

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara tidak mungkin memiliki segalanya dan pasti memiliki satu atau dua kekurangan, mulai dari sumber daya alam, teknologi, dan kemahiran para pekerjanya. Negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, sehingga negara menjadi perwakilan di tingkat internasional dengan membawa tujuan atau kepentingan tertentu demi kebaikan negaranya. Jika sudah berkaitan dengan dunia internasional, maka negara akan berinteraksi dengan negara lain untuk melakukan diskusi dengan mencari titik utama permasalahan dan bernegosiasi untuk mencari solusi akan permasalahan, sehingga kepentingan kedua negara akan tercapai.

Hal tersebut merupakan pengertian dari hubungan diplomatik, salah satu konsep penting dalam dunia Hubungan Internasional. Definisi selanjutnya dari hubungan diplomatik sudah diatur Konvensi Wina 1961 yang berbunyi “Konvensi Wina memberikan kerangka lengkap untuk pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian hubungan diplomatik berdasarkan persetujuan antara negara-negara berdaulat yang independen.”¹

Negara-negara berdaulat tersebut memiliki kekuasaan absolut dalam memutuskan untuk berhubungan diplomatik dengan negara mana pun. Hubungan diplomatik bukan hanya hubungan antara satu negara dengan negara lain saja,

¹ Eileen Denza. 2009. “Vienna Convention on Diplomatic Relations.” *United Nations*. United Nations. March. <https://legal.un.org/avl/ha/vcdr/vcdr.html>.

namun juga antara satu negara dengan organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara. Salah satu yang menarik untuk dibahas yaitu dinamika hubungan diplomatik Turki dan Uni Eropa (UE) pasca-krisis imigran pada 2016–2024.

Sebelum melihat bagaimana dinamika hubungan Turki dan Uni Eropa pasca-krisis imigran pada 2016–2024, ada baiknya memahami dan meninjau sejarah kerja sama dari kedua belah pihak. Hubungan diplomatik Turki dan UE sudah terjalin cukup lama dengan dasar keinginan Turki sebagai salah satu anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO), dan Turki melihat UE sebagai partner kerja sama yang strategis untuk bisa memberikan kemajuan bagi negaranya.

Hubungan diplomatik Turki dan UE dimulai sejak 31 Juli 1959, di mana pada saat itu Turki mengirimkan permohonan untuk bergabung dengan European Economic Community (EEC) dan disetujui pada 12 September 1963 melalui Perjanjian Ankara. Tujuan perjanjian ini adalah penguatan kerja sama dalam perdagangan ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi kedua belah pihak. Turki dan EEC mencoba untuk menghilangkan perbedaan kebijakan ekonomi mereka agar selaras dengan negara anggota lain dan membebaskan tarif terhadap produk-produk industri yang diimpor Turki. Namun, hasil dari kerja sama ini tidak sesuai perkiraan karena stabilitas negara Turki yang buruk hingga penolakan untuk mengikuti rencana negara-negara anggota lainnya. Akibatnya, dinamika hubungan Turki dan EEC mulai memburuk karena alasan politik dan ekonomi. Hubungan mereka secara resmi berakhir pada 12 September 1980 akibat kudeta militer.²

² “Türkiye-EU Relations / History of Türkiye- EU Relations.” 2023. *History of Türkiye-EU Relations*. Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. March 10. https://www.ab.gov.tr/brief-history_111_en.html.

Revitalisasi hubungan dilakukan oleh Turki dan EEC pada 1983 dan Turki kembali mengajukan diri untuk mendapatkan keanggotaan penuh pada 1987 tanpa memedulikan Perjanjian Ankara yang ditargetkan selesai pada 1995. Keputusan yang diambil EEC pada 18 Desember 1989 adalah sebagai berikut:

*“The Community is unable to accept any new members before completing its internal integration. Although it is eligible to join the Community, Türkiye should develop further in economic, social and political terms. Therefore, it is appropriate to continue the relations within the framework of the Association Agreement.”*³

Pernyataan tersebut diterima dengan baik oleh Turki dan mereka fokus untuk melanjutkan kerja sama sebelumnya yang dimuat dalam Perjanjian Ankara. Hasil dari penyelesaian Perjanjian Ankara adalah liberalisasi perdagangan Turki dan UE, membuat industri Turki berkembang pesat dan terintegrasi dengan industri UE. Sehingga, UE melihat Turki berpotensi meskipun hanya jadi anggota tidak tetap.

KTTH Helsinki 1999 menjadi saksi membaiknya hubungan Turki dan UE yang ditandai dengan diakuinya Turki sebagai calon anggota atau salah satu kandidat anggota UE yang akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh UE, yaitu *“stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities.”*⁴ Kriteria tersebut bisa diminta oleh UE karena UE memiliki sifat supranasional, sehingga negara-negara anggota harus patuh kepada nilai-nilai yang dimiliki oleh UE. Hal tersebut berlaku sama dengan negara-negara calon anggota yang di sini salah satunya adalah Turki.

³ “Türkiye-EU Relations / History of Türkiye- EU Relations.” 2023. *History of Türkiye-EU Relations*. Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs. March 10. https://www.ab.gov.tr/brief-history_111_en.html.

⁴ “Accession Criteria (Copenhagen Criteria).” 2024. *EUR*. European Union. Diakses June 10. <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/accession-criteria-copenhagen-criteria.html>.

Kriteria-kriteria tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Turki dalam menjaga relasinya dengan UE dan mencapai tujuan Turki untuk bergabung dengan UE karena Turki sendiri memiliki masalah dalam menjaga stabilitas internal negara dan stabilitas kawasan. Salah satu contohnya adalah ketika Turki bersitegang dengan Yunani dan melakukan aneksasi ke Siprus. Namun, pergantian kabinet dan pemerintahan yang awalnya dipimpin Perdana Menteri Ecevit menjadi Erdogan memberikan sebuah harapan bagi UE. Sehingga, pemerintahan Erdogan diterima negara-negara anggota UE karena terjadi reformasi untuk menyelaraskan tuntutan lama UE dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Erdogan menjabat sebagai perdana menteri yang memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan Turki pada 2002 sebelum terjadinya amandemen. Selama awal kekuasaannya, Erdogan sendiri mendapatkan apresiasi dan penghormatan dari masyarakat Turki karena memiliki progres nyata dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Tidak hanya dari masyarakatnya, Erdogan sendiri juga mendapatkan pengakuan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan negara anggota UE. Hal ini semakin mengangkat nama Erdogan sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh untuk Turki. Namun, Erdogan memanfaatkan kekuasaannya untuk partai politik dan dirinya sendiri, sehingga terjadi pergeseran yang dianggap oleh UE bahwa Turki tidak lagi menganut asas demokrasi.⁶

⁵ Selim Kuneralp. 2017. "Turkey-EU Relations: Past, Present – and Future?: Heinrich Böll Stiftung: Brussels Office - European Union." *Heinrich Böll Stiftung | Brussels Office - European Union*. May 2. <https://eu.boell.org/en/2017/05/02/turkey-eu-relations-past-present-and-future>.

⁶ Selim Kuneralp. 2017. "Turkey-EU Relations: Past, Present – and Future?: Heinrich Böll Stiftung: Brussels Office - European Union."

Salah satu tragedi yang mengguncang dinamika hubungan Turki dan UE terjadi pada 2013, yaitu “The Gezi Park Protests.” Dalam tragedi ini, tergambar dengan jelas bahwa Erdogan ketika terpilih menjadi presiden menggunakan kekuasaannya untuk menjadi pemimpin yang lebih otoriter dan membatasi kebebasan HAM. Diawali dengan protes masyarakat yang damai mengenai pemotongan pohon di Taman Gezi, Istanbul. Pemerintah menanggapi dengan kekerasan dan agresif terhadap masyarakat yang melakukan protes,⁷ sehingga terjadi kekacauan dan jatuhnya korban jiwa sebanyak 12 orang meninggal dunia, 4.000 orang mengalami cedera, 189 orang ditangkap, dan ratusan orang dianggap melakukan terorisme.⁸ UE mengkritik Erdogan dan kebijakan pemerintahnya tentang cara pemerintah menanggapi protes tersebut karena UE sudah memperingatkan Turki untuk memperbaiki penanganan HAM mereka, seperti hak kebebasan berkumpul dan berekspresi. Namun, Erdogan menolak kritik tersebut dan menyerang balik UE dengan menganggap UE menerapkan standar ganda. Tragedi tersebut sudah menjadi nilai buruk untuk Turki dalam menangani isu HAM dan kesempatan Turki untuk bergabung dengan UE menjadi semakin kecil karena hubungan diplomatik mereka menjadi renggang setelah tragedi tersebut.⁹

⁷ Caglar Ezikoglu. 2014. “Turkish Human Rights and EU Accession: The Gezi Park Protests.” *Turkish Human Rights and EU Accession: The Gezi Park Protests*. openDemocracy. February 13. <https://www.opendemocracy.net/en/turkish-human-rights-and-eu-accession-gezi-park-protests/>.

⁸ Mina M. Gul and Zakir Gul. 2023. Human Rights Violations in Türkiye: Loss of Job, Mobbing, Loss of Freedom of Travel, Denial of Health Services, and Persecution. *American Journal of Qualitative Research*, 7(4): 220-240. doi: <https://doi.org/10.29333/ajqr/13579>.

⁹ Luke Harding. 2013. *Erdogan Accuses EU Members of Hypocrisy over Turkey Protests*. Guardian News and Media. June 7. <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/07/erdogan-accuses-eu-hypocrisy-turkey-protests>.

Pada 2016, terjadi konflik Suriah yang membuat masyarakat Suriah terancam dan pergi ke negara-negara tetangga dengan skala besar, mengakibatkan terjadinya migrasi terbesar sepanjang sejarah manusia yang diperkirakan mencapai dua juta orang. Para pengungsi berpindah ke negara-negara anggota UE dan Turki, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menghadapinya, sehingga menghasilkan banyak dampak negatif terhadap kedua belah pihak dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini membuat UE dan Turki berkomitmen untuk bekerja sama dalam rangka penanganan HAM untuk pengungsi dengan menghasilkan EU-Turkey Statement. Tujuan utama dari kerja sama dalam menangani isu krisis imigran ini adalah sebagai berikut:

“(a) by addressing the root causes leading to the massive influx of Syrians, (b) by supporting Syrians under temporary protection and their host communities in Turkey (I), and (c) by strengthening cooperation to prevent irregular migration flows to the EU (II).”¹⁰

Kerja sama ini dilihat bisa menjadi momentum bagi Turki sendiri untuk membuktikan kembali bahwa mereka bisa memenuhi kriteria untuk menjadi anggota tetap UE dengan membantu para pengungsi di negaranya dan menghapus citra buruk dalam isu HAM. Selain itu, UE merasa perlu untuk membendung para migrasi ilegal dan melakukan pendirian kamp pengungsi di Turki untuk memastikan kebutuhan para imigran bisa ditangani.

Penelitian ini melihat dinamika setelah kerja sama dalam menangani dan berakhirnya krisis imigran yang melanda kedua belah pihak karena berkaca dari sejarah yang ada bahwa frekuensi hubungan diplomatik berdasarkan pada kerja

¹⁰ European Commission. 2015. *EU-Turkey Joint Action Plan*. European Commission. October 15. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860.

sama yang dilakukan hanya sebatas pada bidang ekonomi dan politik. Dampaknya juga sangat memengaruhi hubungan mereka. Krisis imigran sendiri adalah isu kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi, di mana hubungan diplomatik Turki dan UE tidak mengacu pada hasil kerja sama di bidang kemanusiaan. Sebagai argumen, penelitian ini melihat bahwa hubungan mereka semakin dekat karena saling mendukung untuk isu kemanusiaan. Pentingnya mengetahui lebih detail pengaruh dinamika internasional serta kerja sama lanjutan yang dilakukan Turki dan UE membuat penelitian ini memiliki judul **“Dinamika Hubungan Diplomatik Turki dan Uni Eropa Pasca-Krisis Imigran Tahun 2016–2024.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah dapat diidentifikasi mulai dari Turki yang memiliki catatan HAM yang buruk sehingga memengaruhi hubungan diplomatik dengan UE. Selain itu, Turki juga tidak pernah bekerja sama dengan UE dalam isu kemanusiaan dan HAM, sehingga penelitian ini perlu diberi batasan masalah agar pembahasan materi atau isi tidak menyimpang dan terlalu luas untuk dijelaskan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan hubungan diplomatik Turki dan Uni Eropa setelah krisis imigran dalam jangka waktu delapan tahun, yang dimulai dari 2016 hingga 2024. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dampak krisis imigran 2016 terhadap relasi Turki dan Uni Eropa?
2. Bagaimana dinamika hubungan antara Turki dan Uni Eropa pasca-krisis imigran pada 2016–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk menggali atau mengetahui informasi terbaru maupun mengembangkan ide baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada situasi Turki ketika sedang mengalami kemunduran demokrasi dan krisis imigran pada rentang waktu 2016–2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya dampak dari situasi tersebut terhadap relasi Turki dan Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkirakan dinamika hubungan Turki dan Uni Eropa pasca-krisis imigran, mengingat pentingnya hubungan antara Turki dan Uni Eropa terkait kepentingan kedua belah pihak dalam mengurangi krisis imigran di Turki.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ingin memberikan kontribusi dalam variasi dan keberagaman literatur hubungan internasional. Merujuk hal tersebut, penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat memahami hubungan diplomatik Turki dan Eropa secara komprehensif sehingga mampu menjadi referensi analisis geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Eropa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini bisa digunakan juga sebagai referensi tentang bagaimana relasi organisasi internasional dengan negara nonanggota dan mengetahui alasan-alasan mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan mereka.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam tulisan ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab satu yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang menghasilkan dua pertanyaan penelitian, serta tujuan dan kegunaan tulisan ini. Bab kedua berisi tinjauan pustaka dan teori konsep. Bagian tinjauan pustaka terdiri dari lima bagian yaitu kerja sama Turki dan Uni Eropa, upaya Turki bergabung dengan Uni Eropa, dampak krisis pengungsi, tata kelola pengungsi Turki dan Uni Eropa, kebijakan luar negeri Turki terhadap Uni Eropa. Bagian teori dan konsep berisikan penjelasan mengenai teori yang digunakan yaitu Neoliberalisme beserta tiga konsep turunan yaitu Organisasi Internasional, regionalisasi, dan interdependensi. Bab ketiga merupakan bagian metodologi yang terdiri dari empat bagian yaitu pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif, proses pengumpulan data sekunder, dan proses analisis data dengan cara kategorisasi.

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan yang menjelaskan data-data yang sudah dikumpulkan dengan menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini dijabarkan menjadi empat subbab yaitu, mengenai kerja sama UE dan Turki pada 2016 terhadap krisis pengungsi, mengenai membaiknya relasi UE dan Turki, mengenai memburuknya relasi UE dan Turki, dan mengenai relasi UE dan Turki pada 2023–2024. Bab lima merupakan penutup dari seluruh penelitian. Bagian ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, penulis menyimpulkan seluruh hasil dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Pada saran, penulis memberikan beberapa masukan bagi aktor utama dalam penelitian untuk langkah selanjutnya atau sebagai evaluasi dari langkah yang sudah dilakukan.